

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA MELALUI PROGRAM PEMILOS SERENTAK BAGI SISWA SMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN KULON PROGO

Muhamad Rival Hidayat
NPP.31.0497

*Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: rivalhidayat406@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra, S.Sos, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Political education is one of the important efforts in realizing civil society. Political education is one of the main tasks and functions of the government, in this case specifically carried out by the Kesbangpol Agency for each region. Kesbangpol Kulon Progo is one of the pioneers in creating political education innovations, especially for beginner voters whose numbers dominate the majority of DPTs in Kulon Progo in particular and Indonesia in general. The efforts of Kesbangpol Kulon Progo are to create a Regency-wide Simultaneous OSIS Election (Pemilos) Program which is run entirely by students. This research uses a qualitative descriptive method. The theory used is role theory according to Bidle and Thomas. This theory has four dimensions, namely expectations, norms, performance, evaluation and sanctions. **Method:** The method used in this research is a qualitative method using interviews as a data collection technique. **Objective:** The aim of this research is to find out the role of the Kesbangpol Agency in carrying out its main tasks and functions in real terms in political education for the public, especially novice voters. The technical data analysis carried out is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of this research conclude that in carrying out its role in carrying out political education through the Pemilos program, several notes were still found, including the lack of effectiveness of the student Election Implementation Committee as an extension of the Kesbangpol Kulon Progo in carrying out its main duties, lack of firm application of reward and punishment and also lack of order. administration of this program. With these various notes, **Conclusion:** Kesbangpol Kulon Progo is required to be more creative and proactive in implementing the Institution's main tasks and functions by using access to the Merdeka curriculum to instill political education and maximize the Election program itself.

Keywords: Political Education, Role, Pemilos, Efforts

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pendidikan politik menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan masyarakat madani. Pendidikan politik menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam hal ini spesifik dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol masing-masing wilayah. Kesbangpol Kulon Progo menjadi salah satu pionier dalam menciptakan inovasi Pendidikan politik utamanya kepada pemilih pemula yang mana jumlahnya mendominasi mayoritas DPT di Kulon Progo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Upaya dari Kesbangpol Kulon Progo yakni membuat Program Pemilihan OSIS Serentak (Pemilos) se-Kabupaten yang diselenggarakan sepenuhnya oleh siswa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori peran menurut Bidle dan Thomas. Teori ini memiliki empat dimensi, yaitu harapan (expectation), norma (norm), wujud perilaku (performance), penilaian (evaluation), dan sanksi (sanction). **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara nyata dalam pendidikan politik kepada masyarakat terkhusus pemilih pemula. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teknis analisis data yang dilakukan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan perannya melaksanakan Pendidikan politik melalui program Pemilos ini masih ditemukan adanya beberapa catatan antara lain kurang efektifnya Panitia Pelaksana Pemilos dari siswa sebagai perpanjangan tangan Kesbangpol Kulon Progo melaksanakan tupoksinya, kurangnya penerapan reward and punishment yang tegas dan juga kurang tertib administrasi dari program ini. **Kesimpulan:** Dengan berbagai catatan tersebut Kesbangpol Kulon Progo diharuskan bisa lebih kreatif dan proaktif lagi dalam melaksanakan tupoksi Lembaga dengan menggunakan akses kurikulum Merdeka untuk menanamkan Pendidikan politik dan memaksimalkan program Pemilos itu sendiri.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Peran, Pemilos, Upaya

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan salah satu instansi yang mengorganisir beberapa instansi pemerintah dalam satu kesatuan dalam menyediakan masyarakat dengan berbagai pelayanan publik yang terintergrasi. Pelayanan publik di bidang perizinan dan rekomendasi menjadi salah satu tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Hanny Rahayu, A., & Purnamasari: 2023) Konsep pemerintahan sebagai sekelompok orang tertentu yang secara baik dan benar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam memimpin masyarakat (Prof Inu Kencana syafie : 2002) menjadi patokan pelaksanaan penyelenggaraan negara di Indonesia, dalam pandangan konsep tersebut tentunya diperlukan konsep politik yang matang terlebih dulu. Pendidikan

politik menjadi salah satu usaha efektif dalam menunjang kemajuan pemerintahan, karena dengan Pendidikan dan pemahaman politik yang baik Masyarakat dapat secara aktif mengontrol pemerintahan baik dari proses pemilihan pimpinan maupun kontrol besar atas kepemimpinan tersebut. Kosasih Djahiri (1995) berpendapat bahwasannya Pendidikan politik adalah Pendidikan atau bimbingan pembinaan bagi setiap warga untuk dapat memahami mencintai dan memiliki keterikatan atas bangsa negara dan seluruh peran kelembagaan yang ada. Dengan pendidikan politik yang baik seperti tujuan utama dari program pemilos oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo diharapkan pemuda bisa memahami politik dan demokrasi yang baik juga dapat mengimplementasikan ilmu tersebut dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kedepannya agar tercapai satu tujuan Indonesia Emas 2045.

Disinilah peran utama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan, dimana bukan hanya sebatas pelaksanaan tugas dan fungsi namun juga terkait usaha memajukan bangsa melalui pemuda. Berbagai catatan pelanggaran pemilu dan permasalahan lainnya memang sudah diusahakan kesbangpol kurangi dengan adanya program pemilos serentak ini, namun masih ada beberapa permasalahan lain dalam program ini sendiri yang juga perlu diperhatikan. Disinilah peneliti tertarik membahas topik penelitian ini dengan meneliti dan menganalisis dari bagaimana kesbangpol berperan meningkatkan Pendidikan politik bukan hanya melalui program pemilos ini yang sudah berjalan 3 tahun, tetapi juga bagaimana kesbangpol berperan mengatasi permasalahan yang ada dalam evaluasi program ini agar tujuan Pendidikan politik sebagai tugas fungsi badan kesbangpol ini tetap maksimal dan relevan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah yang diambil yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada analisis pelaksanaan program Pemilos secara umum, namun belum mengkaji secara spesifik peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan program tersebut. Belum ada penelitian yang meneliti efektivitas program Pemilos serentak dalam meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik di kalangan pemilih pemula (siswa SMA/ sederajat) di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan Pemilos, namun belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan, seperti penyelenggara, guru, dan siswa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah menyediakan referensi dan kerangka kerja bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian mereka sendiri, sehingga peneliti dapat memperluas teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara konsep-konsep yang telah ada serta menemukan inovasi baru yang dapat diaplikasikan dalam penelitian selanjutnya.

Miftahul Khairiyah, Ridho Al-Hamdi dengan judul “Efektivitas Pendidikan Politik Tingkat SMA/ Sederajat dengan Aplikasi E-Pemilos di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Teori yang digunakan ialah teori efektifitas oleh Duncan 1973 yang mana berkaitan dengan focus pada pencapaian tujuan program pemilos dan proses sosialisasi dan adaptasi program. Metode yang

diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan terbukti efektif karena kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, pada indikator integrasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya masih kurang karena proses sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara maupun sekolah/PPO dalam menyampaikan tujuan dari Pemilihan OSIS belum berhasil sepenuhnya. Beberapa siswa pemilih belum memahami tujuan lain dari Pemilihan OSIS selain untuk memilih Calon Ketua OSIS. Dengan demikian, tujuan utama dari pendidikan politik yang menjadi fokus belum sepenuhnya tercapai.

Faizin Iwan Ariyanto (2023) dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Guna Menyambut Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Jombang” Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Teori Peran yang dikemukakan oleh Bidle dan Thomas. Teori ini memiliki empat dimensi, yaitu harapan (expectation), norma (norm), wujud perilaku (performance), penilaian (evaluation), dan sanksi (sanction). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Jombang, upaya sosialisasi politik yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jombang belum mencapai tingkat optimal, terlihat dari kurangnya minat pemilih pemula terhadap metode sosialisasi yang dilakukan. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam menjalankan peran mereka dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah kurangnya keterampilan pegawai Badan Kesbangpol dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat sosialisasi politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jombang, serta menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan dan strategi dalam sosialisasi politik, terutama melalui media sosial.

Ni Made Nandita Agung Cahya Dewi (2023) dengan judul “Pelaksanaan Program desa Peduli Pemuli dan Pemilihan (DP3) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali” Pengumpulan data dalam menjawab rumusan masalah penelitian tersebut bersumber dari tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang mengidentifikasi empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tingkat partisipasi politik yang rendah di Kabupaten Kubu, dengan presentase sebesar 47,32%. Oleh karena itu, program DP3 (Dorongan Partisipasi Politik) dianggap sebagai solusi yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat di Kecamatan Kubu. Jadi, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi partisipasi politik di Kabupaten Kubu dan

mengusulkan solusi berupa program DP3 berdasarkan teori implementasi kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat setempat.

Zindy Zikrahma (2023) dengan judul “Strategi Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik bagi Generasi Z-pada Tahun 2024 di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat” Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model Miles dan Huberman (1984), yang meliputi tahap data reduction, data display, dan conclusion/verification. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyoroti strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran generasi Z untuk terlibat dalam proses pergantian kepemimpinan daerah, yang dilakukan melalui Pendidikan Politik dan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau instansi terkait. Namun, terdapat faktor-faktor yang menghambat, antara lain kurangnya pemanfaatan media sosial. Selain itu, alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi politik dianggap kurang memadai, sehingga menyebabkan kegiatan tersebut kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik generasi Z melalui pendidikan politik dan kerjasama dengan lembaga pendidikan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, seperti kurangnya pemanfaatan media sosial dan keterbatasan anggaran.

Adina Sukmawati, Al Rafni (2020) dengan judul “Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kepemudaan IMM memiliki tiga peran di Kota Padang. Pertama, mereka membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan politik, terutama mengenai masalah-masalah penting. Kedua, mereka membantu kader IMM dengan memberikan pemikiran dan membranding mereka untuk maju di dalam lingkungan kampus. Namun, pendidikan politik menghadapi beberapa tantangan, termasuk anggaran terbatas, keterbatasan sumber daya narasumber, dan masalah manajemen.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitain ini membahas mengenai peran dalam melaksanakan pendidikan politik melalui program Pemilos, membahas secara lebih jelas apa saja yang menjadi hambatan dari catatan yang telah ditemukan. Dengan melaksanakan tupoksi Lembaga ini menggunakan akses Kurikulum Merdeka.

1.5 Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas fungsi Pendidikan politik kepada pemilih pemula melalui program Pemilos
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan pemilihan osis serentak tingkat SMA Sederajat di Kabupaten Kulon Progo
3. Mengetahui dan menganalisis upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena magang riset terapan pemerintahan bertujuan untuk memahami latar belakang dari fenomena yang seringkali sulit dipahami secara mendalam. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi aspek-aspek kompleks dan konteks sosial yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, serta untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang peristiwa tersebut. Lebih lanjut lagi penelitian ini dilakukan dengan mengamati keadaan di lapangan dan peneliti diharuskan untuk menarik kesimpulan secara deskriptif atas permasalahan yang ada agar dapat ditarik sebuah kesimpulan naratif yang jelas dan terperinci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendapatkan beberapa temuan yang menguatkan penelitian ini dan mendapatkan hasil penelitian yang valid, yang kemudian dianalisis baik melalui data primer maupun data sekunder yang didapatkan oleh penulis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo mendidik pemilih pemula melalui program pemilos

Berangkat dari keprihatinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo terhadap maraknya pelanggaran pemilu di tahun 2019 yang mana dilansir dari laporan Bawaslu mencapai 162 temuan yang kemudian didukung dengan hasil observasi lainnya yakni tercantum dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kesbangpol 2019 yang mana beberapa permasalahan tersebut dibahas menjadi suatu isu strategis dan direncanakan dibuat programnya di tahun berikutnya. Beberapa isu tersebut antara lain; Rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan Masyarakat, tingginya potensi konflik antar kelompok yang mengarah pada perpecahan, dan pemahaman kebebasan demokrasi yang berlebihan. Menurut Ely Chinoy (Soekanto: 2015) menjelaskan bahwa pentingnya peran karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya.

Hal ini menimbulkan keprihatinan atas pemahaman politik masyarakat yang perlu Kembali diperkuat, yang mana hal ini juga merupakan tugas fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan sosialisasi politik bagi masyarakat umum. Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai Pendidikan politik dalam artian yang lebih luas. Pendidikan politik yang lebih detail diartikan sebagai usaha secara sadar untuk merubah proses sosialisasi politik masyarakat (Alfian :1981) Pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki maksud tujuan yang hamper berdekatan sehingga dapat digunakan secara bersamaan ataupun bergantian (Dedi Supriyadi: 1999) melalui program ini diharapkan siswa sebagai generasi muda yang diwadahi dalam keanggotaan OSIS di setiap sekolah bisa dikelola dengan baik dan dikontrol Bersama melalui program Pemilos serentak. Karena kegiatan ekstrakurikuler sendiri merupakan Upaya Pendidikan politik secara non formal kepada siswa di sekolah (Nur Sofia Hindun: 2021) Dari pelaksanaan program ini bukan hanya mempermudah jalannya pemilihan OSIS regular setiap tahunnya di

setiap sekolah namun juga bisa dimanfaatkan sebagai media belajar siswa utamanya Pendidikan politik kepada siswa sebagai pemilih pemula dan pelaksanaan tugas pokok fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.

Peran Badan Kesbangpol dalam hal ini ialah melaksanakan Pendidikan politik kepada masyarakat, yang mana notabene hal ini merupakan tugas dan wewenang presiden namun dilimpahkan kepada Gubernur, bupati/walikota melalui asas dekonsentrasi. Landasan hukum dari peran kesbangpol sendiri bermula dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diturunkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Permendagri ini masih dianggap umum sehingga diperlukan Peraturan khusus lebih spesifik yakni Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan dari Perda Kabupaten Kulon Progo No 14 Tahun 2016. Dalam peraturan daerah ini tercantum pada pasal 2 yang menyatakan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik di kabupaten kulon Progo. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Fungsi nyata badan Kesbangpol Kulon Progo yang berkaitan erat dengan peran Pendidikan politik dalam hal ini tercantum dalam pasal 5 huruf a-e Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penelitian ini menggunakan teori peran dari Thomas biddle (Eko A. Meinarno Sarwono: 2015) Dalam menganalisis teori ini diturunkan menjadi beberapa dimensi antara lain yang dapat dilihat dari tingkat expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh badan Kesbangpol yang menempati atau memangku suatu posisi sebagai OPD pemerintahan daerah dengan tugas melaksanakan Pendidikan politik kepada masyarakat salah satunya pemilih pemula.

3.1.1 Expectation (harapan)

Penulis menetapkan 2 indikator atas dimensi ini yakni bagaimana siswa menunjukkan sikap kooperatif dalam pelaksanaan program dan juga bagaimana siswa mewujudkan harapan sesuai peran yang mereka miliki. Penulis menganalisis 3 sumber data wawancara, observasi dan juga dokumentasi dalam upaya menganalisis program pilos ini disesuaikan dengan dimensi spesifik terkait.

Berdasarkan analisis penulis melalui beberapa pengambilan data berupa observasi dokumentasi dan wawancara kepada beberapa pihak terkait menemukan besarnya harapan panitia terkait pemahaman politik yang baik bagi pemilih pemula melalui pelaksanaan program ini

Observasi penulis terkait usaha Badan Kesbangpol Kulon Progo terkait peningkatan dimensi harapan ini juga dimaksimalkan oleh kesbangpol melalui upaya sosialisais untuk menanamkan pemahaman politik melalui berbagai

sosialisasi persiapan pelaksanaan pemilu dan juga program Pendidikan Pancasila dan beberapa program lainnya untuk dapat dijadikan wadah meningkatkan pemahaman politik siswa.

Selanjutnya penulis juga membuat beberapa Forum Grup Discussion Bersama beberapa siswa perwakilan sekolah masing masing yang utamanya berperan dalam proses pemilu ini yakni Panitia pelaksana Pemilu dan juga badan Legislatif siswa berupa Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Dari sekian FGD yang penulis laksanakan ada beberapa siswa yang ternyata masih memerlukan penekanan lebih atas maksud tujuan program ini sebagai perwujudan harapan program yang seharusnya bisa memberi pemahaman politik yang baik pada pemilih pemula.

Dari hasil analisis data diatas dapat ditarik garis besar dari sisi harapan atau expectation masih ditemukan adanya pemahaman yang minim atas politik yang baik itu seperti apa, walaupun tidak semuanya namun hal ini menunjukkan ada yang perlu diperbaiki kedepannya lewat program ini agar harapan berupa tujuan utama program yang memberikan pemahaman politik kepada siswa bisa terlaksana dengan baik dan juga efektif. Peran dari badan Kesbangpol Kulon Progo dalam hal ini yaitu memanfaatkan program P5 dalam kurikulum merdeka demi meningkatkan harapan program agar bisa dipahami oleh setiap siswa sasaran.

3.1.2 Norm (norma)

Implementasi nyata dari dimensi norma dalam Program ini ditunjukkan dengan 2 indikator berupa kesesuaian program yang dilakukan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga peraturan mengenai tupoksi utamanya dari kesbangpol sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Tentunya sebelum mengecek kesesuaian program setiap pihak haruslah bisa memahami dasar hukum bagaimana program ini berjalan agar bisa dilakukan pengecekan oleh masing masing pihak terkait atas pelaksanaannya.

Hasil observasi penulis terkait bagaimana dimensi norma dasar hukum ini diimplementasikan yakni terkait bagaimana peran badan Kesbangpol melaksanakan sosialisasi persiapan program pemilu ini digelar untuk menjelaskan kepada siswa mengenai dasar hukum mereka berjalan dan juga melihat secara langsung bagaimana MOU program pemilu selama ini agar memang program ini berjalan dengan dasar yang jelas dan hasil dari program ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil analisis data penulis menemukan bahwa mayoritas dari siswa masih belum tau dasar hukum dari program ini bahkan setiap PPO yang dituakan dan diharapkan menjadi perpanjangan tangan dari kesbangpol belum memahami dasar hukum mereka bergerak. Kemudian dari beberapa dasar hukum yang sudah ada masih diperlukan adanya pembaharuan yakni perjanjian 5 tahunan tersebut sudah memasuki masa kadaluarsa dan harus diperbaiki kedepannya. Dari hasil observasi penulis menemukan adanya beberapa siswa yang benar belum memahami terkait bagaimana dasar hukum pelaksanaan program meskipun itu dari panitia, peran badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini adalah melaksanakan training kepada Panitia Pelaksana Program pemilu agar bisa lebih memahami jalannya program baik teknis maupun non teknis seperti dasar hukum.

3.1.3 Performance (wujud perilaku)

Dalam penelitian ini wujud perilaku yang dimaksud yakni kegiatan yang dilakukan membawa wujud nyata berupa peningkatan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula lewat program ini apakah sesuai atau perlu dikaji lebih dalam lagi. Indikator dari dimensi ini ialah berupa bagaimana partisipasi dan keikutsertaan siswa dalam pelaksanaan program, dan selanjutnya yakni terkait bagaimana pelaporan hasil pemilu dari siswa yakni PPO sebagai perpanjangan tangan dari Kesbangpol Kulon Progo membantu pelaksanaan Pendidikan politik sebagai peran Kesbangpol.

Dari program ini dapat ditarik kesimpulan dari sisi dimensi performance peran badan Kesbangpol Kulonprogo bisa dikatakan membuat siswa bisa benar benar belajar dan memahami bagaimana politik dan demokrasi itu bekerja. Banyak siswa juga bisa memahami mengenai pentingnya satu suara dalam menentukan pemimpin, termasuk kontrol mereka terhadap yang memimpin mereka dan banyak hal lagi termasuk pemahaman teknis pemilu secara langsung walaupun belum semua siswa mendapat pemahaman ini setidaknya Panitia pemilu bisa menjelaskan ke rekan mereka yang lain.

Catatan bagi perankesbangpol kedepannya yakni dalam hal keikutsertaan dari setiap sekolah juga harus lebih ditingkatkan lagi karena hingga 3 tahun pelaksanaan program ini masih belum bisa 100% partisipasi setiap sekolah. Kekurangan lain program ini yang kedepannya bisa ditingkatkan lagi yakni terkait dengan tolok ukur pelaksanaan program yang setidaknya bisa ditambah lagi bukan hanya sekedar angka partisipasi saja namun bisa merambah ke skor angka pemahaman siswa sebagai sasaran capaian program ini. Namun demikian peran kesbangpol dalam hal penanaman nilai pemaaman politik utamanya kepada siswa sudah dapat berjalan maksimal utamanya terhadap panitia pelaksana program pemilu di setiap sekolah.

3.1.4 Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi)

Dalam penelitian ini dimensi ini ditunjukkan lewat adanya penilaian terhadap hasil program Pemilu dan tindak lanjut dari program tersebut dan bagaimana pertanggung jawaban atas permasalahan yang muncul saat pelaksanaan program. Diharapkan ada dampak positif dari pelaksanaan program ini yang mana juga diwujudkan dengan adanya timbal balik dari panitia terkait dan juga siswa sebagai peserta dan dikontrol melalui evaluasi dan pemberian sanksi dan hukuman juga reward terhadap peserta.

Hasil observasi penulis terkait arsip data evaluasi program selama ini penulis menemukan adanya kekurangan yang mana hasil evaluasi ditemukan penulis dari wawancara saja, catatan evaluasi hanya ada di tahun 2021, sedangkan 2022 2023 tidak ada rekap data evaluasi hanya berupa pelaporan kegiatan sederhana saja. Hal ini menjadi catatan dimana kesbangpol dalam pelaksanaan program ini terkesan kurang maksimal dan kurang tertib dalam bidang administrasi, selain itu penulis juga menemukan tidak adanya pelaporan jelas dari masing pihak terkait pelaksana program ini yang mana menjadi catatan penting dalam peran Kesbangpol Kulon Progo.

Dari analisis data terkait dimensi evaluasi dan sanksi penulis ambil kesimpulan bahwasannya dalam pelaksanaan peran kesbangpol atas program ini masih belum tertib administrasi dilihat dari bagaimana sistem pelaporan hasil kerja

ppo masing masing sekolah dan juga belum adanya punishment jelas dari balaidikmen terhadap sekolah yang belum melaksanakan maupun dari sekolah kepada siswa yang golput. Hal ini perlu menjadi catatan karena program ini dilaporkan setiap tahunnya kepada bupati melalui balaidikmen dan kemenag sebagai hasil upaya Pendidikan politik pemilih pemula. Kemudian hubungan timbal balik melalui pelaporan hasil pemilos juga masih perlu diperbaiki Kembali, dibuktikan dengan hasil pemilos tidak diikuti dengan berita acara tiap sekolah yang mana menyebabkan kurang tertib administrasi dan juga rekapitulasi hasil dan evaluasi tiap tahunnya maish kurang tertib. Hal ini menjadi catatan yang perlu dievaluasi kedepannya agar pelaksanaan program pemilos bisa senantiasa optimal dalam mendidik pemilih pemula sebagai peran dari kesbangpol sendiri.

3.2 Hambatan pelaksanaan Program Pemilos di Kabupaten Kulon Progo

Program pemilihan OSIS serentak diharapkan dapat memberikan pemahaman politik yang baik kepada setiap siswa agar dapat memberikan pemahaman nyata melauai proses pembelajaran praktek langsung bidang politik dan termasuk upaya mempersiapkan pemilih pemula dalam menghadapi pemilu yang akan mereka selenggarakan khususnya di tahun politik seperti 2024 ini. Dalam pelaksanaanya setiap program pasti ada kendala maupun permasalahan apalagi yang berupa program besar seperti Pemilos ini melibatkan sleuruh siswa SMA dan juga SMP sederajat se Kabupaten. Penulis telah merekap beberap acatatan permasalahan dari program ini untuk bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Komitmen Penyelenggara yang Menurun

Dari hasil pengamatan di lapangan penulis menemukan adanya catatan berupa ketidak sesuaian pendapat informan purposive dengan informan siswa yang ada di lapangan saat pelaksanaan program antara lain yakni beberapa pendapat pertanggungjawaban jelas sekolah dibantu balaidikmen maupun kemenag Kulon Progo.

3.2.2 Antusiasme Siswa Yang Masih Kurang

Antusiasme dalam program ini terbagi menjadi 2 yakni antusiasme siswa di setiap sekolah yang masih perlu ditingkatkan Kembali dan juga antusiasme setiap sekolah yang masih perlu digenjut lagi mengingat partisipasi pemilos ini masih belum bisa mencapai 100 persen.

Tabel 3.1 Partisipasi Pemilos 2024

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Ikut Pemilos	Belum Berpartisipasi
Madrasah Aliyah	5	2	3
SMA	18	13	5
SMK	37	10	27
	60	25	35

Sumber: Diolah oleh Penulis

Selanjutnya masih ditemukan siswa yang hanya sekedar melaksanakan perintah guru berupa memilih pemilos namun tidak benar benar belajar detail memahami program tersebut secara mendetail. Tak jarang pula di beberap sekolah yang minim tingkat partisipasinya namun di manipulasi oleh pihak PPO maupun tim sukses salah satu calon agar bisa 100 persen partisipasinya.

3.2.3 Permasalahan Anggaran

Permasalahan selanjutnya ialah menyangkut anggaran dari Kesbangpol sendiri yang minim, Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesbangpol kulon Progo Mudopati Purbohandowo, S.STP menyatakan terkait evaluasi pelaksanaan pemilos umumnya pelaksanaan Pendidikan politik kesbangpol dianggarkan hanya sejumlah Rp.50.000.000,- Setiap tahunnya hal ini menyebabkan minimnya pertemuan dan persiapan kepada siswa utamanya ppo yang menjadi perpanjangan tangan Kesbangpol dan KPU. Pembekalan dan TOT yang dilaksanakan banyak hanya melalui metode daring yang dirasa kurang efektif bagi siswa karena lebih susah ditangkap dan kurang efektif.

Dalam pelaksanaan observasi penulis juga tidak menemukan adanya pelaporan anggaran yang jelas terkait pelaksanaan program yang mana hal ini juga menjadi catatan terkait anggaran yang memang minim dan kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis penulis terkait permasalahan anggaran ini menjadi catatan penting karena bukan hanya pelaporan yang kurang jelas namun juga pada kenyataan teknis jumlah biaya pelaksanaan program masih begitu minim, dengan anggaran yang terbatas Kesbangpol harus bisa menjalankan program dari persiapan pelaksanaan hingga akhir program di pengumuman dan juga penutupan program, peran Kesbangpol dalam mengelola anggaran dan juga tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjadi focus yang perlu diperhatikan.

3.2.4 Adanya Temuan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilos

Pelanggaran pelaksanaan pemilos ini berupa manipulasi suara yan terjadi di beberapa sekolah yang penulis temukan karena catatan teknis program yang perlu diperbaiki lagi kedepannya, salah satu sekolah yang mengalami dinamika kecurangan tersebut ialah SMAN 1 Wates. Dari analisis penulis ini ditemukan tidak adanya upaya atau peran kesbangpol secara nyata dalam memprediksi maupun mencegah pelanggaran program yang ada seperti diatas, hal ini kedepan bisa mempengaruhi kepercayaan siswa terkait pelaksanaan program bahkan bisa menanamkan nilai atau stigma buruk atas politik dalam arti umum. Peran kesbangpol dengan memberikan pemahaman lebih masih harus diperlukan melalui program kurikulum merdeka.

3.3 Upaya badan kesbangpol dalam meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa program dalam meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula, Program Pemilos Serentak sendiri merupakan salah satu usaha Kesbangpol meningkatkan pemahaman politik dan juga melaksanakan tupoksi Badan. Meskipun dengan beberapa catatan program yang dibuat kesbangpol seperti anggaran dan juga antusiasme peserta, kesbangpol kulon progo membuat solusi lain

seperti membuat program Pendidikan politik kepada beberapa kelompok pemilih pemula tokoh agama, tokoh Masyarakat lain dan sebagainya.

Meskipun dengan biaya anggaran yang minim namun Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tetap berusaha mmeberikan pelayanan maksimal kepada Masyarakat utamanya dalam melaksanakan upaya Pendidikan pemahaman politik yang baik kepada masyarakat. Dari hasil analisis penulis melalui triangulasi data yang dikumpulkan Nampak bagaimana peran kesbangpol melalui program pemilos melaksanakan tugas pokok fungsi dengan upaya se maksimal mungkin walaupun dengan beberapa catatan anggaran yang terbatas, kesbangpol kulon progo melakukan bebrapa improvisasi seperti memanfaatkan adanya program p5 dari kurikulum Merdeka untuk dapat melakukan sosialisasi kepada siswa bukan hanya terkait pemilos namun juga dalam hal upaya meningkatkan pemahaman politik yang baik kepada Masyarakat utamanya dalam hal ini ialah pemilih pemula.

3.4 Diskusi Temuan Utama penelitian

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khairiyah, Ridho Al-Hamdi yang berjudul Efektivitas Pendidikan Politik Tingkat SMA/Sederajat dengan Aplikasi E-Pemilos di Kabupaten Kulon Progo, hasil penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan dari program pemilos ini dalam Upaya Pendidikan politik pemilih pemula namun dengan catatan harus lebih diperhatikan beberapa teknis pelaksanaannya antara lain beberap ahambatan pelaksanaan danjuga partisipasi dari pemilih yang mulai menurun. Dibandingkan dengan penelitian oleh Faizin Iwan Ariyanto Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Guna Menyambut Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Jombang, peran kesbangpol dalam penelitian ini lebih jelas terlihat karena ada Solusi nyata dari permasalahan berupa partisipasi yang kurang oleh pemilih pemula dan didorong menggunakan cara lain seperti sosialisasi diluar program yang sama menunjang keberhasilan maupun output program ini menjadika peran badan kesbangpol lebih jelas terlihat.

Dibandingka ndengan penelitian oleh Ni Made Nandita Agung Cahya Dewi yang berjudul Pelaksanaan Program desa Peduli Pemuli dan Pemilihan (DP3) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, penulis menemukan kesamaan adanya peningkatan nyata dari peran kesbangpol mendidik pemilih pemula menjadikan ada output yang tercapai dalam perankesbangpol ini. Zindy Zikrahma dalam judul skirpsinya yang membahas Strategi Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik bagi Generasi Z-pada Tahun 2024 di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, penulis menemukan adanya permasalahan yang sama diantara kedua penelitia nini berupa anggaran namun Badan Kesbangpol Kulon Progo bisa lebih cekatan mengambil pern dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melaksakan program mencapai output capaian.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo terbagi kedalam 5 dimensi yakni expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (penilaian) dan sanction

(sanksi). Dari dimensi harapan, peran kesbangpol dalam meningkatkan keberhasilan program ini dalam mencapai pemahaman politik pemilih pemula dilaksanakan melalui program tambahan diluar Program pemilos sendiri agar siswa diharapkan bisa lebih mudah mencapai output program. Dari dimensi Norma, peran nyata kesbangpol ialah melakukan training kepada panitia pemilos agar bisa memahami dasar pelaksanaan program dan juga diharapkan bisa menyebarluaskan kepada rekan mereka yang lain sebagai perpanjangan tangan dari kesbangpol. Dari dimensi wujud perilaku ditemukan dalam analisis penulis bahwasannya program ini bisa menjadi media belajar nyata. Bagi pemilih pemula memahami konsep politik, penulis menemukan pemahaman politik meningkat utamanya bagi panitia program tiap sekolah hasil penanaman nilai dari peran kesbangpol kulon progo. Terakhir dari evaluasi dan sanksi penulis menemukan adanya catatan pelaksanaan peran kesbangpol yang masih perlu diperhatikan seperti penertiban administrasi baik pelaporan program tiap sekolah maupun administrasi induk di kesbangpol seperti anggaran dan juga adanya sekolah yang masih acuh terhadap program ini yang seharusnya diberi penekanan lebih sebagai wujud peran kesbangpol memaksimalkan perannya mencapai output program dan juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.

Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Kesbangpol Kulon Progo melalui program ini masih ditemukan beberapa hambatan antara lain komitmen penyelenggara yang menurun, antusiasme yang masih kurang, permasalahan anggaran, dan adanya temuan dalam pelaksanaan program pemilos ini.

Dari hasil analisis penulis melalui triangulasi data yang dikumpulkan nampak bagaimana peran kesbangpol melalui program pemilos melaksanakan tugas pokok fungsi dengan upaya semaksimal mungkin walaupun dengan beberapa catatan anggaran yang terbatas, kesbangpol kulon progo melakukan beberapa improvisasi seperti memanfaatkan adanya program diluar pemilos seperti penanaman nilai pancasila dari kurikulum merdeka untuk dapat melakukan sosialisasi kepada siswa bukan hanya terkait pemilos namun juga dalam hal upaya meningkatkan pemahaman politik yang baik kepada masyarakat utamanya dalam hal ini ialah pemilih pemula.

Keterbatasan Penelitian. Fokus penelitian hanya pada Kabupaten Kulon Progo, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada daerah lain.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bidang Politik dalam Negeri Kesbangpol Kulon Progo, dan Siswa SMA/Sederajat sebagai narasumber yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan

mensukseskan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981)

Djahiri., A. Kosasih., *Kapita Selekta Politik Kenegaraan.* (Bandung: LPPKH., 1995)

Dedi Supriyadi, *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru* (yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999).

Prof.Dr.H. Inu Kencana Syafie M.Si, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

W.Sarlito, and Eko A. Meinarno Sarwono, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)

Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Sastra, Jakarta: Raja Grafindo Persada* (Rajawali Pers, 2015), xxiv.

Undang- Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jurnal:

Al-Hamdi, Ridho, Miftahul Khairiyah, and Miftahul Khairiyah, 'Efektivitas Pendidikan Politik Tingkat SMA/Sederajat Dengan Aplikasi E-Pemilos Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta', *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.1 (2023), 43–57
<<https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.15280>>

Ariyanto, Faizin Iwan, 'Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Menyambut Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Jombang'

Hindun, Nur Shofia, Inayatul Ulya, and M Sofyan Alnashr, 'Pendidikan Politik Bagi Anak Melalui Organisasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah', *Dawuh Guru*:

Jurnal Pendidikan MI/SD, 1.1 (2021), 27–40
<<https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.268>>

Ni Made Nandita Agung Cahya Dewi, 'Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemuli Dan Pemilihan (DP3) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali'

Sukmawati, Adina, and Al Rafni, 'Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda Di Kota Padang', *Journal of Civic Education*, 3.2 (2020), 191–99
<<https://doi.org/10.24036/jce.v3i2.349>>

Zindy Zikrahma, 'Strategi Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Generasi Z-Pada Tahun 2024 Di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat', 2023

Hanny Rahayu, A., & Purnamasari, 'Quality Of Service in the National Unity and Agency of Bekasi City', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1) (2023), 29–43 <<https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3174>>.

